



Buletin Bulanan

**Badan Analisis Informasi dan Kebijakan (BAIK)
Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia**

**Diterbitkan oleh Badan Analisis Informasi Kebijakan
KADIN Indonesia**

**Penanggungjawab:
Ahmad Erani Yustika**

**Tim penyusun:
Hadi Prayitno Dani Setiawan Dita Nurul Aini Hendi Subandi
Widya Kartika Lukman Hakim Ulfa Purwaningsih Try Wahyu Widha**

NARASI INDONESIA: EDISI AGUSTUS 2024



NARASI UTAMA

- | | |
|----------|--|
| 1 | Kesehatan: International Social Security Association (ISSA) Apresiasi Capaian Universal Health Coverage (UHC) Indonesia |
| 2 | Ekonomi Indonesia: Pertumbuhan Ekonomi Nasional Melambat pada Triwulan II 2024 |
| 3 | Kewirausahaan & UMKM: Kementerian Koperasi Dan UMKM Akan Revitalisasi 7 Pusat Layanan Unit Terpadu (PLUT) |
| 4 | Seputar KADIN Indonesia: Refleksi 3 Tahun KADIN Indonesia: KADIN Indonesia Hadir Sebagai Mitra Pemerintah |



Insight

Indonesia menerima penghargaan atas capaian Universal Health Coverage (UHC) dari International Social Security Association (ISSA) melalui cakupan JKN yang mencapai 98% dari total penduduk. Piagam Penghargaan diberikan langsung oleh Presiden ISSA di Jakarta pada Juli 2024 kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, didampingi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ditengah penganugerahan UHC Awards 2024.

Pada UHC Awards 2024, selain pemberian piagam penghargaan dari ISSA, pemerintah Indonesia juga memberikan penghargaan dari berbagai kategori utama kepada 14 kepala daerah. Direktur Utama BPJS, Ali Ghufron Mukti, mengatakan bahwa sudah ada 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota yang berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan per 1 Agustus 2024, angka kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mencapai 98,19 persen dari total penduduk Indonesia atau setara dengan 276.520.647 jiwa. Angka ini merefleksikan komitmen negara dalam memastikan akses kesehatan bagi seluruh warga.





Insight

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,05% secara tahunan (*year-on-year/yoy*) pada kuartal II 2024. Sebelumnya, pada kuartal I 2024, ekonomi tumbuh solid di angka 5,11%. Pada triwulan III-2024, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 5,02% dan melambat pada triwulan IV-2024 menjadi sebesar 5% di tengah inflasi yang relatif terkendali di bawah 3%.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini dianggap resilien. Secara struktur, mayoritas pertumbuhan ekonomi ditopang oleh komponen konsumsi rumah tangga dengan kontribusi lebih dari 50%.

Jika dibandingkan dengan masa pandemi, sisi konsumsi rumah tangga menunjukkan tanda perbaikan. Namun, kondisi tersebut belum bisa dikatakan pulih karena konsumsi rumah tangga saat ini masih lebih rendah dibandingkan masa sebelum pandemi. Pada tahun 2022, konsumsi rumah tangga sempat terganggu karena adanya penyesuaian harga BBM.



KEWIRAUSAHAAN & UMKM: KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM AKAN REVITALISASI 7 PUSAT LAYANAN UNIT TERPADU (PLUT)



Insight

Kemenkop UKM berencana merevitalisasi 7 Pusat Layanan Usaha Terpadu - Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PLUT KUKM). Revitalisasi ini merupakan lanjutan dari program redesain PLUT KUKM, atau New PLUT KUKM, yang telah dilakukan sejak 2023.

Lokasi PLUT yang akan direvitalisasi antara lain: Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Aceh, Kota Surakarta, Kabupaten Subang, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan.

Revitalisasi PLUT menuju New PLUT adalah upaya optimalisasi fungsi dan layanan melalui perubahan orientasi dan paradigma pengelolaan PLUT ke dalam konteks kekinian. Terdapat 10 layanan di New Plut, antara lain: **Pertama**, konsultasi dan pendampingan usaha; **Kedua**, pendaftaran usaha pada sistem perizinan berusaha; **Ketiga**, pelatihan teknis dan manajerial; **Keempat**, pemenuhan sertifikasi dan standarisasi produk; **Kelima**, inkubasi bisnis; **Keenam**, promosi dan pemasaran produk; **Ketujuh**, kurasi UMKM; **Kedelapan**, pengembangan jejaring kemitraan lintas sektoral; **Kesembilan**, *co-working space*; **Kesepuluh**, fasilitas pendukung kewirausahaan lainnya.



Insight

Ketua Umum KADIN Indonesia akan mendukung pemimpin terpilih, sesuai dengan amanat AD-ART KADIN Indonesia. Sebagai mitra pemerintah, KADIN Indonesia akan membantu dalam menyusun Peta Jalan Indonesia Emas 2045 dengan memberikan masukan dan rekomendasi untuk mempersiapkan Indonesia sebagai negara maju.

KADIN Indonesia saat ini juga tengah mempersiapkan *white paper* sebagai masukan dan rekomendasi untuk pemerintahan terpilih. *White paper* tersebut merupakan hasil urung rembuk dari berbagai elemen, baik KADIN seluruh daerah, asosiasi organisasi, asosiasi profesi, akademisi, unsur keagamaan, hingga organisasi massa.

KADIN Indonesia selalu berperan sebagai wakil pemerintah dalam menarik para pengusaha dan investor global datang ke Indonesia. Hal ini terlihat dari peran menonjol KADIN Indonesia dan Arsjad Rasjid dalam momentum G20 di Bali pada 2022, ASEAN BAC 2023 pada KTT ASEAN di Jakarta, dan sejumlah momentum lainnya.





TERAS ISU

1

PELEMAHAN PMI MANUFAKTUR INDONESIA

2

PEMBENTUKAN SATGAS IMPOR ILEGAL

PELEMAHAN PMI MANUFAKTUR INDONESIA

S&P Global telah merilis data PMI Manufaktur Indonesia yang menunjukkan penurunan dan kontraksi ke 49,3 pada Juli 2024.

PMI Manufaktur Indonesia terus memburuk dan menurun selama empat bulan terakhir. PMI anjlok dari 54,2 pada Maret 2024 menjadi 49,3 pada Juli 2024.

Faktor pemicu melemahnya Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia:

1. PMI mengalami kontraksi karena penurunan permintaan dalam dan luar negeri. Menurunnya permintaan disebabkan oleh tren pelemahan musiman serta kompetisi dengan produk-produk impor.
2. Dari segi moneter, PMI Manufaktur yang terkontraksi ini diakibatkan oleh rambatan efek suku bunga tinggi di global.

Langkah ke depan:

1. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan yang mendukung stabilitas ekonomi dan merangsang permintaan dalam negeri. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan insentif fiskal seperti pemotongan pajak untuk industri manufaktur guna mengurangi biaya beban produksi.
2. Pemerintah harus memperkuat nilai tukar Rupiah melalui intervensi pasar yang tepat serta meningkatkan kepercayaan investor dengan menjaga stabilitas politik serta keamanan.
3. Pemerintah juga perlu meningkatkan daya beli masyarakat melalui program stimulus ekonomi yang menyasar sektor rumah tangga.

PEMBENTUKAN SATGAS IMPOR ILEGAL

Kementerian Perdagangan (Kemendag) resmi membentuk **Satuan Tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal** yang berisi 11 anggota dari berbagai Kementerian dan Lembaga.

Satgas impor ilegal dibentuk pada 18 Juli 2024 dan bertugas hingga 31 Desember 2024.

Dasar hukum pembentukan Satgas ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang perdagangan.

Anggota Satgas Impor Ilegal (11 orang): Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut, Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).

Tugas dan Tanggung Jawab Satgas Impor:

- ❖ Melakukan penyelidikan terhadap masuknya barang impor ilegal hingga melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran impor.
- ❖ Menelusuri dan memastikan barang di pasaran memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau tidak.
- ❖ Barang yang diawasi hanya tertentu (7 barang impor), seperti tekstil dan produk tekstil, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, keramik, elektronik, alas kaki, kosmetik, dan barang tekstil sudah jadi lainnya.
- ❖ Sasaran kerja diarahkan kepada importir dan distributor besar.

Langkah ke depan:

- ❖ Merumuskan dan mencari titik simpul utama/akar masalah utama yang menyebabkan masuknya barang impor ilegal.
- ❖ Adanya transparansi kebijakan masuknya barang impor.
- ❖ Satgas bekerja bukan untuk mendapatkan *eksposure* media dengan menangkap pengusaha, tetapi ke sasaran utamanya, yakni importir dan distributor besar.
- ❖ Memperketat impor melalui pelabuhan dengan mengubah aturan pengawasan barang-barang yang dilarang atau dibatasi (lartas) menjadi *border* atau diawasi dalam kawasan pabean.

1	Kesehatan
2	Pendidikan
3	Teknologi
4	UMKM
5	Keberlanjutan
6	Ketahanan Pangan dan Pertanian
7	Logistik & Rantai Pasok
8	Ekonomi Maritim
9	Ketahanan Energi
10	Lainnya



Kesehatan

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Terdapat 22 aspek layanan dalam 1.072 ketentuan teknis yang dibahas dalam PP ini. Sebelum ditetapkan, PP ini telah melalui proses partisipasi publik, harmonisasi, hingga pembahasan sejak Agustus 2023-Juli 2024.

Pengesahan PP ini merupakan salah satu langkah transformasi kesehatan dan dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri dan inklusif. Penerbitan PP ini sekaligus membatalkan 26 PP dan 5 Peraturan Presiden (Perpres) seperti PP No. 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan dan PP No. 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja



Pendidikan

BPS melaporkan adanya deflasi sebesar 0,18% (*month-to-month/mtm*) pada Juli 2024. Angka deflasi ini lebih tinggi dari deflasi bulan sebelumnya, yakni 0,08%, ataupun dari Mei 2024 sebesar 0,03%. Ditengah deflasi tersebut, kelompok pendidikan menjadi kelompok yang mengalami inflasi paling tinggi pada Juli 2024.

Komoditas pendidikan mengalami inflasi sebesar 0,69%. Laju inflasi ini lebih tinggi dari pada bulan sebelumnya sebesar 0,01%. Kenaikan inflasi pendidikan disebabkan oleh faktor tahun ajaran sekolah baru meliputi biaya sekolah dasar, biaya sekolah menengah pertama, dan biaya sekolah menengah atas.



Teknologi

HUT Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) diisi dengan lomba makan kerupuk, balap karung, dan panjat pinang. Berbeda dengan daerah lain, di Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur (Jatim) digelar lomba pembuatan poster dan lagu menggunakan *Artificial Intelligence* (AI). Lomba ini digelar oleh sejumlah anak muda yang tergabung dalam Karang Taruna Nawasena.

Beragam poster mengenai peringatan Kemerdekaan ke-79 RI muncul dari ide segar dan kreativitas para muda-mudi tersebut. Beberapa peserta yang terdiri dari remaja Gen Z dan Gen Alpha juga membuat poster-poster ikon salah satu game populer yang digemari anak muda, yakni gim pertempuran PlayerUnknown's Battle Ground atau PUBG.



UMKM

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) mengungkapkan bahwa PP No 28 Tahun 2024, yang baru disahkan oleh Presiden, berpotensi merugikan sektor UMKM di Indonesia. Regulasi ini, dikenal sebagai PP Kesehatan karena dianggap dapat mematikan pedagang asongan, pedagang kaki lima, dan warung kelontong.

Aturan yang memberatkan UMKM adalah larangan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Kebijakan ini akan menurunkan omzet signifikan bagi warung kelontong dan pedagang kaki lima yang mengandalkan penjualan rokok sebagai sumber pendapatan utama.



Keberlanjutan

PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) pada 24 Agustus 2021 menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap II Tahun 2021 Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 9,55% per tahun. Jumlah pokok obligasi sebesar Rp473,5 miliar dan akan jatuh tempo pada 24 Agustus 2024.

Seluruh dana itu akan digunakan Adhi Karya untuk tiga hal: **Pertama**, belanja modal berupa aset tetap, yaitu alat proyek dan penyertaan proyek investasi infrastruktur kepada badan usaha pelaksana di bidang transportasi dan sumber daya air; **Kedua**, pembayaran sebagian utang pokok; **Ketiga**, modal kerja untuk mendanai kegiatan usaha jasa konstruksi.



Ketahanan Pangan & Pertanian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melakukan pembinaan pengendalian alih fungsi lahan sawah di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui program Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD).

Selama ini, kendala dalam perlindungan lahan sawah adalah banyaknya regulasi perlindungan lahan namun tidak berjalan dengan maksimal. Hal tersebut karena beberapa hal yang belum diimplementasikan dalam UU 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) ke dalam Rencana Tata Ruang.



Logistik dan Rantai Pasok

Menko PMK meresmikan gudang logistik di Distrik Sinak dan Distrik Agandugume, di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, untuk mengantisipasi bencana kelaparan. Dua gudang logistik yang dibangun pemerintah lewat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dipicu oleh pengalaman bencana kelaparan pada tahun 2023.

Dalam gudang seluas 510 meter persegi di Distrik Sinak disediakan cadangan pangan berupa beras dan umbi-umbian yang siap didistribusikan apabila dibutuhkan masyarakat. Sementara gudang logistik di Distrik Agandugume masih dalam tahap pembangunan dengan luas 300 meter persegi.



Ekonomi Maritim

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mengoperasikan 225 kapal feri untuk menjaga ketahanan maritim dan ekonomi nasional dan memastikan transportasi laut yang aman dan efisien guna mendukung distribusi barang serta meningkatkan konektivitas antar pulau di seluruh Indonesia. ASDP telah menjadi jembatan nusantara yang menyatukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Miangas hingga Rote.

Kinerja semester I 2024 ASDP mencatat capaian signifikan dengan melayani 5,89 juta penumpang dan 11,42 juta kendaraan berkat digitalisasi di 37 pelabuhan seluruh Indonesia yang mempermudah akses dan transaksi layanan penyeberangan.



Ketahanan Energi

PT Pertamina (persero) melakukan optimalisasi kilang minyak di beberapa wilayah operasionalnya. Langkah ini dilakukan Pertamina untuk hadir bagi negeri, terutama dalam mendukung ketahanan energi nasional sebagai pemimpin di bidang transisi energi.

Pertamina berkomitmen mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDG's). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.



Lainnya

Kemendag resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) pengawasan barang impor ilegal yang berisi 11 anggota dari berbagai Kementerian dan Lembaga. Satgas impor ilegal dibentuk pada 18 Juli 2024 sampai 31 Desember 2024. Dasar hukum pembentukan Satgas ini adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 dan PP Nomor 29 tahun 2021 tentang perdagangan.

Anggota Satgas Impor Ilegal (11 orang): Kementerian Perdagangan, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Badan Intelijen Negara (BIN), BPOM, Badan Keamanan Laut (Bakamla) atau TNI Angkatan Laut, Dinas Kabupaten Kota yang membidangi perdagangan, dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia.

- 1 Peredaran Obat Tidak Memenuhi Syarat di Afrika
- 2 Olimpiade XXXIII di Paris
- 3 Potensi Penurunan Perekonomian Timur Tengah



Peredaran Obat Tidak Memenuhi Syarat di Afrika

Sebuah penelitian dari Universitas Bahir Dar, Ethiopia, memperkirakan 22,6% obat-obatan yang beredar di Afrika merupakan obat yang tidak memenuhi syarat atau palsu. Temuan ini mendukung temuan UNODC di 2023 yang menyebutkan bahwa peredaran obat-obatan tersebut menyebabkan kematian hingga 500.00 orang di Sub-Sahara Afrika. Menurut WHO, obat yang paling sering dipalsukan adalah antibiotik dan obat malaria.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa tingginya peredaran obat-obatan tidak bermutu ini disebabkan oleh aturan hukum yang permisif, hadirnya zona-zona perdagangan bebas, rendahnya sistem registrasi obat-obatan, permintaan yang tinggi, serta rendahnya standar impor. Access to Medicine Foundation juga mengatakan, panjangnya rantai pasok medis yang resmi di Afrika memperburuk permasalahan ini.



Olimpiade XXXIII di Paris

Olimpiade Musim Panas ke-33 telah dilaksanakan di Perancis pada 26 Juli-11 Agustus 2024. Pada olimpiade ini, Amerika Serikat memimpin dengan total 126 medali termasuk 40 emas, sedangkan Indonesia berhasil meraih 3 medali termasuk 2 medali emas untuk panjat tebing dan angkat berat. Olimpiade ini ditutup dengan penampilan artis-artis dari tuan rumah Olimpiade 2028, Amerika Serikat.

Perhelatan dengan anggaran USD8,2 miliar ini diperkirakan berkontribusi meningkatkan PDB Perancis antara 0,25-0,3% yang didapat dari penjualan tiket, hak siar, hingga pariwisata. Akan tetapi, para ekonom mengkhawatirkan jika peningkatan PDB ini tidak akan banyak berguna ke masyarakat karena inflasi yang masih tinggi dan rendahnya kepercayaan investor ditengah keributan politik Perancis.



Potensi Penurunan Perekonomian Timur Tengah

IMF Kembali merevisi perkiraan pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk wilayah Timur Tengah dan Asia Tengah. Untuk 2024, pertumbuhan diperkirakan menurun 0,4% ke 2,4%, sedangkan 2025 diperkirakan ikut menurun 0,4% ke 4%. Sedangkan indeks saham-saham gabungan di negara-negara Timur Tengah secara umum menurun pada akhir Juli hingga awal Agustus 2024.

Penurunan perekonomian di wilayah Timur Tengah ini diperkirakan karena kekhawatiran pasar atas potensi eskalasi konflik Timur Tengah ke wilayah lain serta kekhawatiran resesi di Amerika Serikat. Selain itu, perpanjangan pengurangan produksi minyak OPEC+ yang seharusnya berakhir di 2024 ke akhir 2025 juga telah mempengaruhi harga minyak dan pasar modal di Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.



INDONESIA DALAM ANGKA

1	Ekonomi
2	Suku Bunga dan Bisnis
3	Realisasi APBN
4	UMKM dan ESG
5	Utang Luar Negeri dan Cadangan Devisa

5 INDONESIA DALAM ANGKA: JULI 2024

Ekonomi

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Pertumbuhan Ekonomi (TW II 2024)

5,05% ● Proyeksi 5,3%

Ekspor (Juni 2024)

USD19,31 miliar ▼ -8,36% y-o-y

Inflasi (Juni 24)

2,51% ▼ -0,33% y-o-y

Suku Bunga BI B17DRR (Juli 2024)

6,25% ▲ 0,00 bps

Rata-Rata Nilai Tukar IDR/USD (Juli 2024)

15.940 ▼ 0,32% m-o-m

Suku Bunga (Juli 2024)

Deposit Facility 5,5% Lending Facility 6,5%

Suku Bunga Penjaminan (Juli 2024)

Bank Umum Valas BPR
IDR 4,25% 2,25%
6,75%

Bisnis (Juli 2024)

Indeks PMI Industri
49,3 ▼ -1,4% m-o-m

Indeks Keyakinan Konsumen

123 ▼ 3% m-o-m

Indeks Harga Konsumen

106 ▲ 0% m-o-m

Indeks Harga Perdagangan Besar

2,99 ▼ 0,11% m-o-m

Indeks Penjualan Riil

212 ▲ 4,4% y-o-y

Realisasi APBN (Rp T, Juni 2024)

Pendapatan Pemerintah 1316,5 ▲ 6,8% yoy
PPh Badan 173 ▼ -35% yoy
PPN DN 193 ▼ -11% yoy
PPN Impor 126 ▲ 1,75% yoy

Belanja Pemerintah 1.398 ▲ 11,34% yoy
Belanja Pemerintah Pusat 998 ▲ 11,93% yoy
TKDD 400 ▲ 9,90% yoy
Dana Desa 40 ▲ 25,6% yoy

Surplus/Defisit Anggaran -77,3 ▼ 150% yoy

Suplus/Defisit thd PDB 0,34%

Pembiayaan Anggaran 168 ▼ 25% yoy

UMKM dan ESG

Index ESG per 30 Juli 2024

ESGS KEHATI 133,52 ▲ 0,87

ESGQ KEHATI 133,23 ▲ 0,88

SRI-KEHATI 400,42 ▲ 1,67

ESG Leaders 160.05 ▲ 0,43

Low Carbon Leaders 126.06 ▲ 0,43

UMKM terdaftar (per 2023)

Usaha Mikro 6.887.479

Usaha Kecil 187.402

Usaha Menengah 23.350

Kredit UMKM (Rp T, Okt 2023)

1.432

Realisasi KUR (Rp T, Des 2023)

1,572

Debitur KUR (Juta, Des 2023) 44,31

Utang Luar Negeri (ULN) (USD M, Mei 2024)

Utang Luar Negeri

407,3 ▼ 1,8% y-o-y

Utang Pemerintah

191 ▼ -0,8% y-o-y

Utang Swasta

197 ▼ 1,4% y-o-y

Cadangan Devisa (USD M, Juli 2024)

145,4 ▲ 0,0% y-o-y

Setara dengan:

Pembiayaan 6,5 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah.



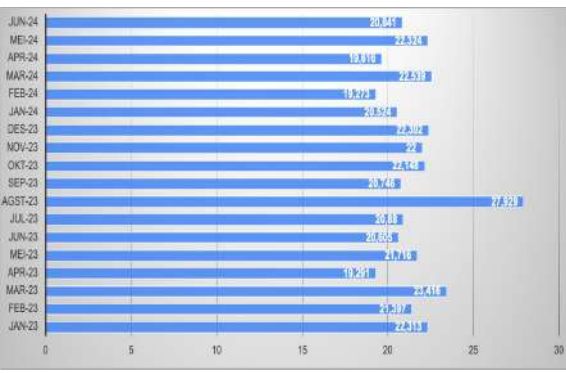
INDONESIA DALAM ANGKA - EKSPOR & IMPOR



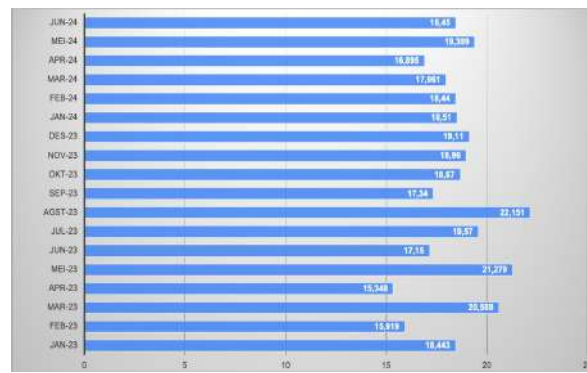
INDONESIA DALAM ANGKA EKSPOR & IMPOR

1	Total Ekspor
2	Total Impor
3	Komoditas Unggulan Ekspor

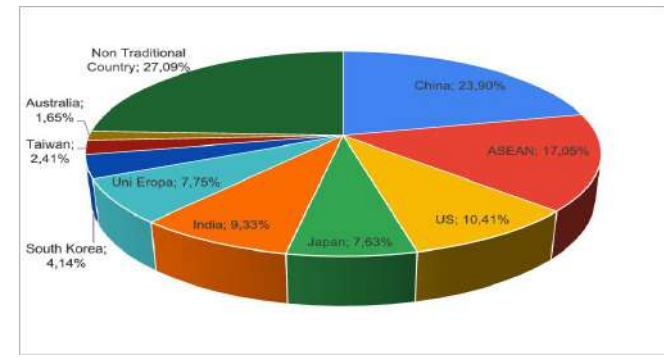
Total Ekspor (USD juta)



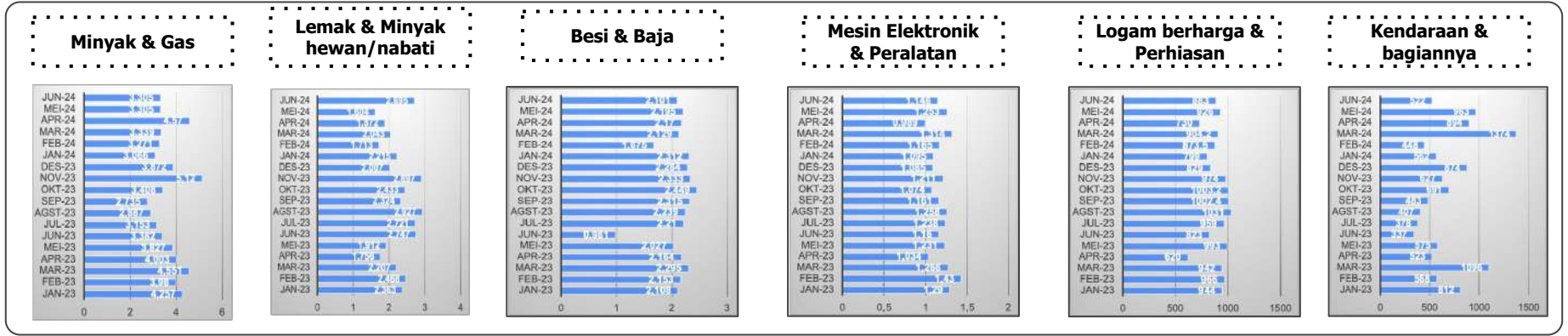
Total Impor (USD juta)



Market Share Perdagangan Juli 2024



Komoditas Ekspor (USD juta)





INDONESIA DALAM ANGKA PMA & PMDN

1

Total Investasi

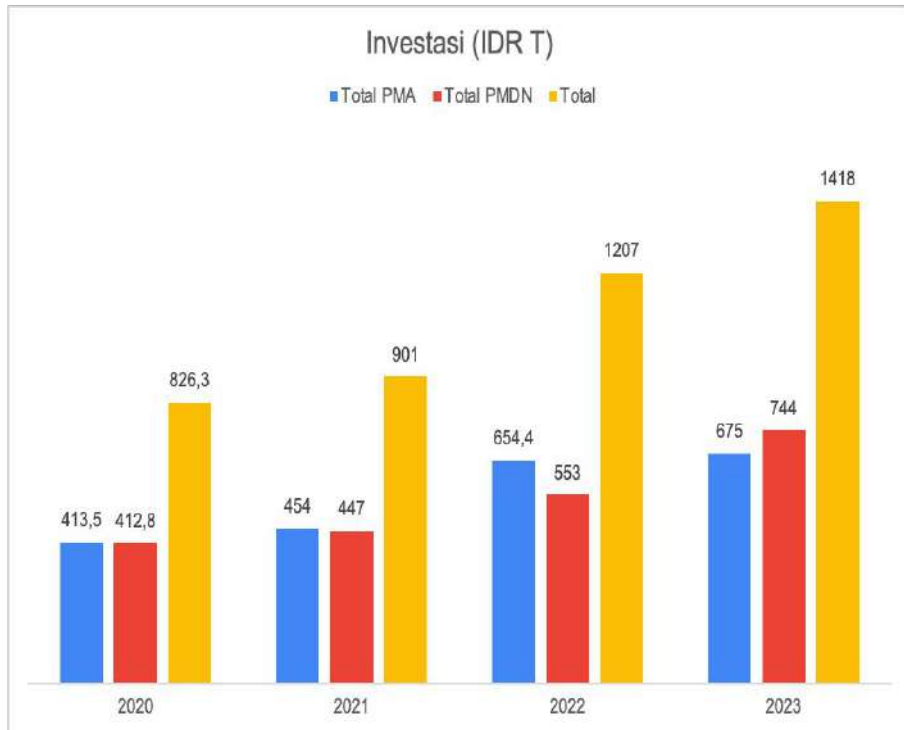
2

PMA Sektoral

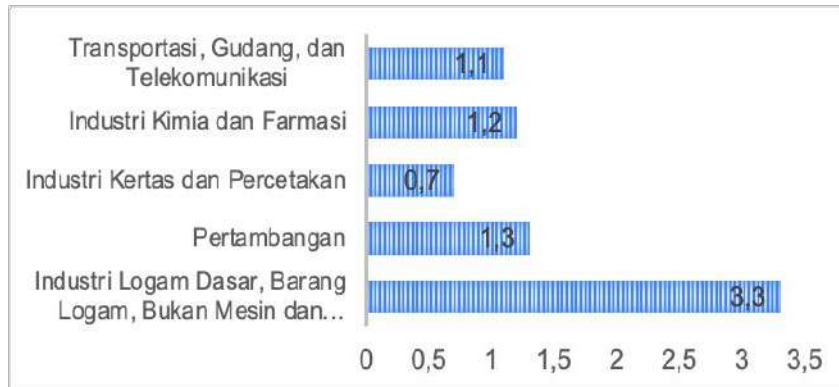
3

PMDN Sektoral

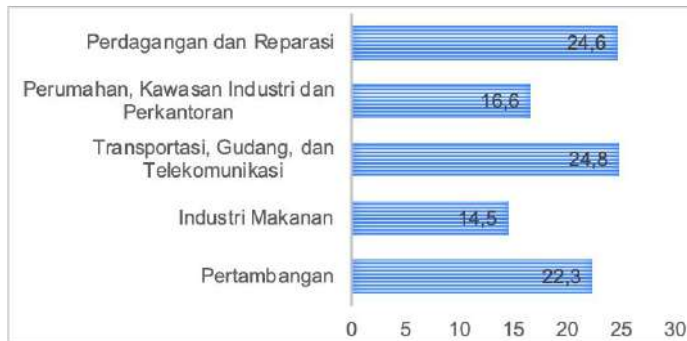
Total Investasi (USD juta)



PMA Sektoral (USD juta)



PMDN Sektoral (IDR Triliun)





TERIMA KASIH

Menara Kadin Indonesia 3rd, 24th & 29th Floor
H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3 Jakarta 12950 Indonesia
Phone : +62 21 5274484 (Hunting) Fax : +62 21 5274331, 5274332